

## Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 2 Oktober 2020

*Sumber Pengambilan Dokumen*

<b>A</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	
1	APBD Perubahan Jabar 2020 Berkurang Rp 2 Triliun	<i>Radar Bandung/Hal. 12</i>
2	Berkurang Rp 2,7 Triliun	<i>Galamedia/Hal. 3</i>
<b>B</b>	<b>Kota Bandung</b>	
3	Pemkot Siapkan Rp 26 Miliar	<i>Galamedia/Hal. 8</i>
<b>C</b>	<b>Kabupaten Bandung</b>	
4	Rp 109 Miliar Untuk Renovasi SJH	<i>Pikiran Rakyat/Hal. 4</i>
<b>D</b>	<b>Kabupaten Garut</b>	
5	Pemkab Kucurkan Dana Persiapan Pembentukan KGU	<i>Galamedia/Hal. 6</i>

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

## BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: APBD Perubahan Jabar 2020 Berkurang Rp 2 Triliun
Entitas / Cakupan	: Provinsi Jawa Barat
Sumber / Hal	: Radar Bandung/Hal. 12
Edisi	: Jumat, 2 Oktober 2020

**BANDUNG** - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Rabu (30/9). Dalam rapat tersebut, DPRD Jabar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sesuai rancangan, perubahan yang telah disetujui yakni APBD Jabar TA 2020 yang semula Rp46.095.261.227.603 berkurang Rp2.787.100.819.100 menjadi Rp43.308.160.408.503.

Emil sapaan Ridwan Kamil pun menyampaikan terima kasih kepada DPRD Jabar yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda Perubahan APBD Jabar TA 2020.

"Saya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan terima kasih yang sebe-

sar-besarnya kepada yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah bersungguh-sungguh melakukan pencermatan, penajaman dan penyempumaan, sehingga pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan sesuai ketentuan," ucap Emil.

Menurutnya, penyusunan APBD TA 2020 merupakan wujud komitmen antara pihak eksekutif dan legislatif untuk menunjukkan keseriusan dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jabar.

"Hal itu bertujuan mendorong akselerasi penyelenggaraan dan kualitas kinerja pemerintahan dan pembangunan di Jabar," tuturnya.

Rancangan perubahan APBD TA 2020 juga disusun dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan

## APBD Perubahan

## Jabar 2020

## Berkurang

## Rp2 Triliun

penganggaran daerah berdasarkan prioritas pembangunan, serta berkaitan pemenuhan kebutuhan dalam penanganan

pandemi global Covid-19 di Jabar. "Dengan volume APBD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp43,308

triliun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta meningkatkan ekonomi dan sosial yang

IST

terdampak oleh pandemi Covid-19," jelas Emil.

Penyusunan rancangan perubahan APBD TA 2020 ini disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah serta secara proses berdasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar Tahun 2019.

Dengan selesainya seluruh pembahasan Raperda Perubahan APBD TA 2020 antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Jabar, serta telah ditandatangani persetujuan bersama terkait Raperda tersebut, kemudian Raperda itu akan di evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Dalam pidatonya, Emil menambahkan, untuk meningkatkan hasil pembangunan yang lebih berkualitas pada Perubahan APBD

TA 2020, perangkat daerah akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan percepatan proses tender dengan melakukan perencanaan paket tender secara matang untuk menghindari kegagalan tender.

"Penting menjadi perhatian bersama bahwa setelah rancangan peraturan daerah disetujui dengan DPRD, pengumuman rencana umum pengadaan dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabel," paparnya.

Emil berharap, upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan khususnya dalam Perubahan APBD Jabar TA 2020 dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan visi Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. (muh/b)

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Berkurang Rp 2,7 Triliun

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 3

Edisi : Jumat, 2 Oktober 2020

## Berkurang Rp 2,7 Triliun

### ■ APBD Perubahan Jabar Tahun 2020 Disetujui Jadi Perda

Rancangan perubahan APBD Tahun 2020 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berdasarkan prioritas pembangunan serta berkaitan pemenuhan kebutuhan dalam penanganan pandemi global Covid-19 di Jabar

"Dengan volume APBD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 43,308 triliun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta meningkatkan ekonomi dan sosial yang terdampak oleh pandemi Covid-19," ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jabar Kota Bandung, Jln. Diponegoro, Rabu (30/9) malam.

Menurut Emil —sapaan Ridwan Kamil—, penyusunan APBD Tahun 2020 merupakan wujud komitmen

antara pihak eksekutif dan legislatif untuk menunjukkan keseriusan dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jabar.

"Hal itu bertujuan mendorong akselerasi penyelenggaraan dan kualitas kinerja pemerintahan dan pembangunan di Jabar," tambahnya, dikutip dari *PRFM*.

Untuk meningkatkan hasil pembangunan yang lebih berkualitas pada Perubahan APBD Tahun 2020 ini, kata Emil, perangkat daerah akan

DIPONEGORO, (GM).-

DPRD Jawa Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda). APBD Jabar Tahun 2020 yang semula Rp 46.095.261.227.603 berkurang Rp 2.787.100.819.100 menjadi Rp43.308.160.408.503.

melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan percepatan proses tender dengan melakukan perencanaan paket tender secara matang untuk menghindari kegagalan tender.

"Penting menjadi perhatian bersama bahwa setelah rancangan peraturan daerah disetujui dengan DPRD pengumuman rencana umum pengadaan dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang mengedepankan prinsip efektivitas,

transparansi, dan akuntabel," katanya.

Emil berharap, upaya pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan khususnya dalam Perubahan APBD Jabar Tahun 2020 dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan visi Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

"Saya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah bersungguh-sungguh melakukan pencermatan, penajaman, dan penyempurnaan, sehingga pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan sesuai ketentuan," tuturnya. (R.05)\*\*

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : APBD Perubahan Jabar 2020 Berkurang Rp 2 Triliun

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Radar Bandung/Hal. 12

Edisi : Jumat, 2 Oktober 2020

## Pemkot Siapkan Rp 26 Miliar

### ■ Untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Terdampak Covid-19

**A**sisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Setda Kota Cimahi, Achmad Nuryana mengungkapkan, DID dari pemerintah pusat sudah dua kali masuk ke kas daerah Pemkot Cimahi. Tahap pertama diterima Rp 11 miliar, lalu yang kedua kalinya sebesar Rp 15 miliar.

"Kita tetap harus melakukan kegiatan pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, dan anggarannya bersumber dari DID yang sudah masuk kas daerah Pemkot Cimahi," terang Achmad kepada "GM" di Pemkot Cimahi, Jln. Demang Hardjakusumah, Kamis (1/10).

Achmad menjelaskan, kegiatan pemulihan ekonomi yang bersumber dari DID tersebut secara teknis akan digunakan pada Triwulan IV oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Cimahi.

Achmad menyebutkan, SKPD yang akan menggunakan anggaran tersebut di antaranya Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperin), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker),

**D. HARDJAKUSUMAH, (GM).-**

**Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menyiapkan anggaran sekitar Rp 26 miliar untuk kegiatan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) pemerintah pusat.**

Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangan), Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Cibabat, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) serta SKPD lainnya. "Anggarannya akan kita gunakan di Triwulan IV ini atau mulai Oktober," ucap Achmad.

Achmad melanjutkan, sedangkan untuk skema pinjaman daerah yang diluncurkan pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sementara ini bukan opsi prioritas.

Pihaknya akan membahas opsi tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota

Cimahi.

"PEN itu jadi opsi berikutnya, semisal untuk menutup deficit. Apabila ada kegiatan mendesak, nah pakai anggaran tersebut. Hanya untuk sementara ini, kita memanfaatkan DID dulu," ujarnya.

Diakuiinya, pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap perekonomian di Kota Cimahi. Apalagi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan beberapa waktu lalu, meskipun saat itu kegiatan perekonomian masih berjalan.

"Dikatakan dalam kondisi terpuruk sih enggak, masih berjalan seperti biasa, cuma pasti terdampak. Namun secara matematis, ki-

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

ta tidak memegang datanya," tutur Achmad.

## **Pelatihan**

Sementara Kepala Disdagko-perin Kota Cimahi, Dadan Darmawan menambahkan, anggaran yang bersumber dari DID tersebut akan digunakan pihaknya untuk memberikan pelatihan terhadap para pelaku UMKM di Kota Cimahi yang memang terdampak selama pandemi Covid-19 ini.

"Ada beberapa kegiatan pelatihan. Misalnya membuat hand sanitizer, masker dan face shield, serta e-commerce. Intinya ada beberapa kegiatan yang orientasinya ke pemulihan ekonomi, dan disesuaikan dengan kondisi saat ini," beber Dadan.

Seperti diketahui, wabah virus corona selain menyebabkan korban jiwa yang begitu banyak, juga mengakibatkan porak porandanya tatanan ekonomi. Sebab itulah pemerintah pusat dan daerah tengah berusaha memulihkan kembali perekonomian, salah satunya membantu modal usaha para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). (B.110)\*\*

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Rp 109 Miliar Untuk Renovasi SJH

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal. 4

Edisi : Jumat, 2 Oktober 2020

## Rp 109 Miliar Untuk Renovasi SJH

### SOREANG, (PR).-

Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran Rp 109 miliar untuk renovasi Stadion Si Jalak Harupat (SJH) pada 2021. Jumlah itu melengkapi anggaran yang sudah dialokasikan pada 2020 sebesar Rp 27 miliar.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Marlan mengatakan, alokasi anggaran tersebut digelontorkan sebagai persiapan Stadion SJH menjadi salah satu venue Piala Dunia U-20. "Rencananya, akhir tahun ini kami juga kembali memulai proses renovasi," ujarnya di Soreang, Kamis (1/10/2020).

Menurut Marlan, perbaikan yang akan segera dilakukan meliputi sejumlah infrastruktur sekeliling stadion seperti penambahan lampu, penggantian rumput lapangan, perbaikan tempat duduk penonton, pemasangan sistem tata suara stadion, juga perbaikan jalan, dan drainase. Semuanya infrastruktur tersebut akan diperbaiki untuk memenuhi

standar FIFA.

Marlan melansir, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2020, SJH terpilih sebagai satu dari enam arena tuan rumah pesta sepak bola dunia yang akan digelar pada tahun 2021.

Lima stadion lainnya adalah Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Jakabaring Palembang, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya dan I Wayan Dipta Gianyar Bali.

"Dari enam stadion penyelenggara Piala Dunia U-20, hanya dua stadion yang akan direnovasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu Stadion Manahan Solo dan I Wayan Dipta Gianyar Bali. Sementara empat stadion lainnya termasuk Si Jalak Harupat, diserahkan kepada daerah dan provinsi," kata Marlan.

Marlan menambahkan, selain memiliki satu *venue* baru yang tersertifikasi FIFA, pihaknya juga berencana membangun wisma atlet.

"Di kawasan SJH ini terdapat 15 *venue*, satu *venue* baru yakni lapang latihan atau *soccer training*, telah memiliki sertifikasi dari FIFA. Di area ini juga, nantinya akan dibangun wisma atlet oleh Kementerian PUPR," ucapnya

Dalam kesempatan tersebut, Marlan juga menyampaikan terkait perubahan regulasi bidang olah raga Indonesia. Menurutnya, jika olah raga berdampak pada kesehatan masyarakat, maka pemerintah harus membuat peraturan penggunaan anggaran dalam mendukung kegiatan olah raga.

"Kalau memang olah raga berdampak pada kesehatan, harus ada persentase anggaran yang jelas. Dengan begitu, gairah olah raga daerah ini jadi tumbuh dengan baik. Contohnya, peraturan yang melarang pemerintah daerah membiayai klub sepak bola. "Padahal, klub-klub kecil di daerah memiliki potensi dalam mencetak regenerasi pemain sepak bola profesional," tutur Marlan. **(Handri Handriansyah)\*\*\***

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pemkab Kucurkan Dana Persiapan Pembentukan KGU

Entitas / Cakupan : Kabupaten Garut

Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 6

Edisi : Jumat, 2 Oktober 2020

## Pemkab Kucurkan Dana Persiapan Pembentukan KGU

### **GARUT, (GM).-**

Bupati dan Wakil Bupati Garut bersama jajaran DPRD serta perwakilan Forum Masyarakat Garut Utara (Gatra) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2020, Kamis (1/10).

Rapat paripurna digelar dalam rangka pembahasan pembentukan daerah persiapan Kabupaten Garut Utara (KGU) dengan acara penandatanganan persetujuan bersama. Cakupan wilayah daerah persiapan Kabupaten Garut Utara terdiri dari 116 desa dengan sebelas kecamatan.

Untuk 11 kecamatan yang akan masuk KGU yaitu Limbangan, Cibatu, Kadungora, Karangtengah, Kersamanah, Leles, Leuwigoong, Malangbong, Selaawi, Sukawening, dan Cibiuk. Lokasi ibu kota daerah Kabupaten Garut Utara nantinya akan berada di Kecamatan Cibiuk.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menyetujui pembentukan Kabupaten Garut Utara atas segala yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dalam mengupayakan terbentuknya daerah otonomi baru.

Menurutnya, wilayah Garut Utara secara politik memenuhi persyaratan untuk menjadi kabupaten baru. "Pembentukan kabupaten baru ini semata-mata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut Utara," ujarnya, kemarin.

Rudy menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Garut akan mem-

berikan dukungan dana. Pemberian ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan Kabupaten Garut Utara minimal sebesar Rp 15 miliar rupiah per tahun untuk jangka waktu tiga tahun berturut-turut sejak peresmian.

Selain memberikan dukungan dana, lanjut Rudy, Pemkab Garut juga akan memberikan bantuan dalam bentuk lainnya. Sebanyak 2.885 PNS akan diserahkan untuk bertugas di wilayah calon daerah persiapan.

"Kita juga akan memberikan sarana dan prasarana berupa aset pemerintahan, serta dokumen rekapitulasi keputusan BPD dan berita acara cakupan wilayah," ucapnya.

### **Siap bergabung**

Sebelumnya, Ketua FM Gatra H. Holil Aksan Umarzen mengucapkan syukur bahwa sebanyak 116 desa dari 11 kecamatan yang ada di wilayah bagian Utara telah menyatakan persetujuannya untuk bergabung ke DOB Kabupaten Garut Utara. "Ini dibuktikan dengan berita acara Musdes yang ditandatangani oleh BPD dan Kepala Desa," ujarnya.

Holil juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Garut, Asda 1 dan Kabag Tapem Setda Garut yang telah membantu memfasilitasi untuk sosialisasi DOB Kabupaten Garut Utara ke warga masyarakat yang ada di 116 Desa, sehingga apa yang menjadi persyaratan telah terpenuhi 100 persen. (ags)\*\*